BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah-masalah ketenagakerjaan bersifat multi dimensi karena menyangkut permasalahan jutaan jiwa dan mempengaruhi serta di pengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah di mengerti.

Adapun permasalahan ketenagakerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh masalah kemiskinan, ketidakmerataan, pendapatan, lulusan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, stabilitas politik dan lain sebagainya.

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugas sebagaimana tercantum di dalam peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor : 45 Tahun 2008.

Bidang ketenagakerjaan tahun anggaran 2011 memprioritaskan peningkatan kualitas SDM bagi para pelaku proses produksi, barang dan jasa melalui berbagai pelatihan teknis dan managemen memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengagguran melalui penyaluran tenaga kerja, penempatan tenaga kerja formal dan informal, kedalam maupun keluar negri serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan penyertaan kelembagaan pekerja.

Bidang transmigrasi tahun anggaran 2011 memprioritaskan penataan potensi kawasan transmigrasi, penyiapan sarana dan prasarana serta keserasian lingkungan dan legalitas lahan.

1.2 Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)

Kesadaran akan kekurangan tanah di pulau Jawa yang menimbulkan kemelaratan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah, telah berumur lebih dari 70 tahun ketika penduduk pulau Jawa belum lebih dari pada 30 juta jiwa dengan kadar yang berbeda-beda dari masa ke masa kekhawatiran akan tekanan penduduk yang semakin padat di pulau Jawa, semakin terasa dan program transmigrasi senantiasa mendapat tempat yang penting di dalam program pembangunan di Indonesia.

Hal ini tercermin dan berkaca pada pemimpin bangsa antara lain :

Strategi pembangunan transmigrasi harus di letakan pada jangkauan pemikiran jangka panjang dalam rangka pembangunan nasional yang meratakan pembangunan keseluruhan wilayah tanah air guna membangun masyarakat baru yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Program Transmigrasi sungguh tidak ada bandingan nya dan yang terbesar dari jenisnya dewasa ini di dunia sungguh transmigrasi adalah program terbesar dari jenisnya dalam sejarah modern yang melibatkan satu

bangsa dalam perpindahan sukarela karena alasan-alasan perdamaian ekonomi dan kemanusiaan.

Perpindahan penduduk khususnya dari pulau Jawa dalam sejarah perkembangan nya telah di mulai awal abad ke xx yaitu dimasa pemerintahan colonial Belanda. Perpindahan penduduk yang di laksanakan dimasa ini selain di dalam usaha untuk mengatasi kepadatan penduduk juga di utamakan untuk kebutuhan mencari tenaga kerja yang murah guna di pekerjakan di perkebunan-perkebunan Belanda di luar Jawa. Usaha perpindahan penduduk di masa ini di kenal dengan sebutan kolonisasi yaitu dengan menempatkan petani – petani Jawa ke desa-desa baru di luar Jawa. Penempatan petani dengan kolonisasi ini di mulai pada tahun 1905 dengan pemindahan 155 keluarga petani dari daerah Kedu menuju daerah Gedong Taizan di Kemsidenan Lampung.

Setelah Indonesia merdeka masalah kolonisasi mendapat peranan dalam tahun 1947 masalah kolonisasi atau pemindahan rakyat di cantumkan sebagai salah satu tugas kementrian perburuhan dan social.

Pada tahun 1948 tugas kolonisasi di alihkan ke kementrian pembangunan dan pemuda nama kolonisasi pun diganti menjadi transmigrasi.

Pada tahun 1948 kementrian pembangunan dan pemuda dibubarkan dan penyelenggaraan transmigrasi di tugaskan kepada kementrian dalam negeri selanjutnya pada tahun 1949 penyelenggaraan transmigrasi menjadi tugas kementrian pembangunan masyarakat dalam

organisasi kementrian pembangunan masyarakat ini terdapat jawatan transmigrasi dengan pimpinan di serahkan kepada Suratno Sastromidjojo.

Pada saat berdirinya Negara kesatuan, kementrian pembangunan masyarakat ditiadakan dan menurut putusan Presiden R.I Nomor 18/PM/1950 tanggal 26 oktober 1950 seluruh pegawai jawatan transmigrasi masuk kedalam kementrian social yang dalam programnya mendapat tugas penyelenggaraan transmigrasi.

Pada akhir tahun 1950 yaitu pada periode kabinet Natsir (6 September 1950 sampai dengan 27 April) dimana jawatan transmigrasi dipimpin oleh Ir. A H O Tambunan, tepatnya pada pada tanggal 12 desember 1950 di mulailah pengiriman transmigrasi yang pertama berjumlah 23 KK (77 jiwa) dari kecamatan Bagelan Karesidenan Kedu ke Sukadana – Lampung yang selanjutnya pada setiap tanggal 12 desember di jadikan hari bhakti transmigrasi.

1.3 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)

Sebagai Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi yang banyak memiliki tujuan untuk menjadi lebih baik lagi kedepan nya sepantasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemban Visi dan Misi untuk menyampaiakan informasi, mendidik dan membentuk masyarakat yang terampil. Berikut adalah Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.3.1 Visi

Visi yang di bangun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera serta dapat meningkatkan kinerja Dinas Transmigrasi adalah : "Membangun Manusia Karya Untuk Sejahtera" (*Dinas tenaga kerja Transmigrasi 2010*)

Melaui visi tersebut dicita-citakan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan tenaga kerja.

1.3.2 Misi

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan dan menjalin hubungan kerja yang luas guna memudahkan system kerja Dinas Transmigrasi sebagai berikut :

1. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas.
3. Pembinaan penempatan tenaga kerja sektoral/regional di dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak.
4. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan, pengawasan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

5. Pengendalian pertumbuhan dan pengembangan kualitas transmigran.
6. Penciptaan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
7. Pengerahan,persebaran dan mobilitas penduduk dalam upaya pemerataan dan peningkatan produktivitas.
8. Memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri dan sejahtera dalam rangka menunjang pembangunan Daerah.
9. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Pontianak

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan kondisi strategis yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat menetapakan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

   Tujuan kedua ini terkait dengan misi kedua, “Pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas.

b. Meningkatnya kesejahteaan masyarakat dengan perluasan lapangan kerja.

   Tujuan yang kedua ini terkait dengan misi ketiga, “Pembinaan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja sektoral/regional di dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak”.

c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

   Tujuan keempat terkait dengan misi keempat, “Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan, pengawasan serta peningkatan kesejahteraan pekerja”.

d. Peningkatan kualitas transmigran.

   Tujuan ini terkait dengan misi ke lima “pengendalian pertumbuhan dengan pengembangan kualitas transmigran”.

e. Pemberdayaan kawasan transmigrasi sebagai pengembangan tanaman pangan, tanaman perkebunan dan industri kecil.

   Tujuan ini terkait dengan misi ke enam “penciptaan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

f. Pemerataan penduduk dan hasil-hasilnya.

   Tujuan ini terkait dengan misi ketujuh “Pengerahan persebaran dan mobilitas penduduk dalam upaya pemerataan dan peningkatan produktivitas”.

g. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri.

Tujuan ini terkait dengan misi kedelapan“memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri dan sejahtera dalam rangka menunjang pembangunan daerah”.

1.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Transmigrasi Pontianak

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tujuan pertama, “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas mampu menghadapi persaingan yang semakin terbuka ataupun menjadi usahawan mandiri dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, efisien dan produktif guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas”. Tujuan pertama ini berkaitan dengan misi ke dua yang mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Table 1.1

(Sasaran dan Indikator Sasaran)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Tersedianya tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat	2.516 org
2.	Tersedianya lembaga pelatihan swasta yang berkualitas	Jumlah instruktur yang bersertifikat	32 org

Tujuan kedua, " untuk mendorong kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik dipedesaan maupun diperkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional". Tujuan ke dua ini berkaitan dengan misi ke tiga, mempunyai sasaran sebagai berikut :

Table 1.2

(Sasaran dan Indikator Sasaran)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terbukanya lapangan kerja baru	Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam negeri	380 orang
2.	Tersedianya sistem informasi dan bursa kerja terpadu di kab/kota	Jumlah lowongan kerja	730 orang

Tujuan Ketiga, “Terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja”. Tujuan ketiga ini berkaitan dengan misi ke empat dengan sasaran dan indikator sasaran sebagai sebagai berikut :

Table 1.3

(Sasaran dan Indikator Sasaran)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	· Jumlah pelaku hubungan industrial yang ikut sosialisasi · Persentase peningkatan UMP	435 orang 10%
2.	Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan tidak adanya pelanggaran norma kerja	· Jumlah tenaga kerja yang ikut sosialisasi · Jumlah perusahaan yang melaksanakan K3 dan Norma kerja	860 orang 469 psh

Tujuan keempat, “ Untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya meningkatkan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestic dan internasional,

sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi". Tujuan keempat ini berkaitan dengan misi kelima dengan ke enam yang mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Table 1.4

(Sasaran dan Indikator Sasaran)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terciptanya kondisi transmigran yang sejahtera	Jumlah transmigran yang diakhiri status pembinaannya	250 KK

Tujuan kelima, " Untuk mendorong dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah – wilayah yang dihuni komunitas adat terpencil. Tujuan kelima ini berkaitan dengan misi kelima dengan ke enam yang mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

Table 1.5

(Sasaran dan Indikator Sasaran)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Tersedianya unit pemukiman baru	Jumlah transmigran yang ditempatkan	673 orang

1.6 Sejarah Divisi bidang Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT)

Bidang pembinaan masyarakat dan kawasan Transmigrasi (PMKT) merupakan bagian dari dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor : 10 tahun 2008 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

Kedudukan Bidang PMKT adalah sebagai bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan social budaya dan sumber daya manusia, pembinaan usaha ekonomi dan investasi serta sarana, prasarana dan informasi ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan Bidang PMKT didukung oleh sebanyak 22 orang pegawai dengan pembagian tugas dibagi habis kesemua pegawai yang ada.

Pelaksanaan tugas umum pemerintah oleh Bidang PMKT meliputi pengelolaan barang-barang inventaris kantor, pelayanan ketransmigrasian, penyiapan bahan perumusan pembinaan ketransmigrasian, sosialisasi, bimbingan teknis yang di laksanakan ditingkat lapangan / kabupaten.

Tiga program pokok yang menjadi perhatian Bidang PMKT pada tahun 2011 ini yaitu Program Pembinaan Sosial Budaya dan SDM, Program Pembinaan Usaha Ekonomi dan Investasi serta Program Sarana, Prasarana dan Informasi Ketransmigrasian yang secara kuantitatif s/d januari 2011 adalah melaksanakan pelayanan pembinaan warga Transmigrasi di UPT PTA sebanyak 22 UPT / 4.320 KK dan Transmigrasi yang akan di tempatkan pada Tahun Anggaran 2011 sebanyak 1.284 KK. Untuk mengakomodasikan tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan orientasi penyelenggaraan Transmigrasi yang semakin kompleks maka perlu disusun rincian tugas Bidang PMKT yang kemudian dapat di jadikan bahan Acuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

1.7 Maksud dan Tujuan Divisi Bidang Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (PMKT)

1. Maksud penyusunan program adalah untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang PMKT Tahun Anggaran 2011.
2. Tujuan penyusunan Program kerja adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang dengan akhir Tahun anggaran 2011.

1.7.1 Sasaran Divisi Bidang pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (PMKT)

Sasaran program kerja ini adalah terwujudnya pelayanan masyarakat dan pembinaan sosial budaya, pelayanan usaha ekonomi serta sarana, prasarana dan informasi ketransmigrasian.

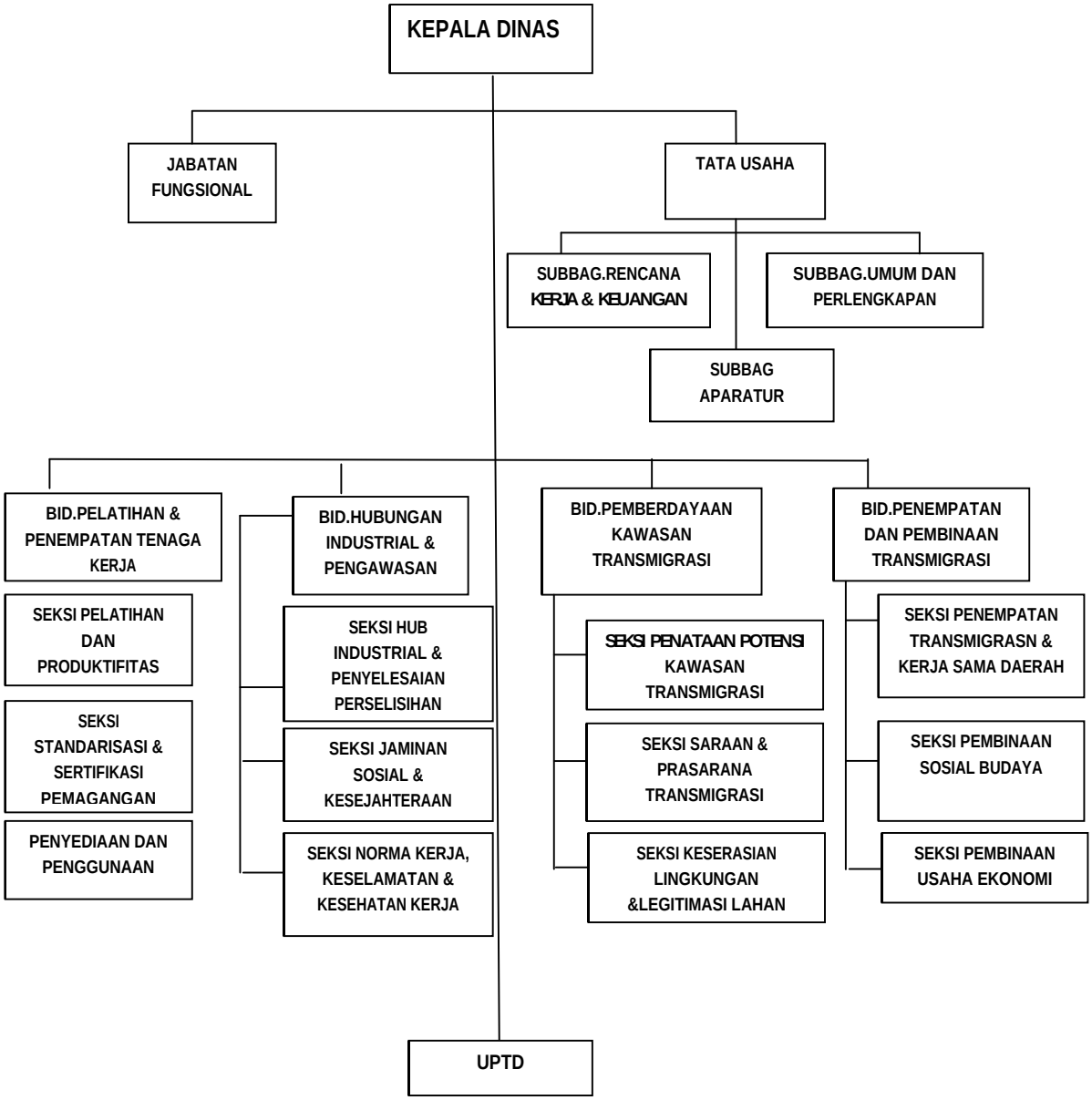
1.8 Sturktur Perusahaan/instansi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a) Kepala Dinas
b) Bagian Tata Usaha
c) Bagian Pelatihan dan Penempatan Kerja
d) Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja
e) Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi
f) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
g) Kelompok jabatan fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran Gubernur ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur. Gambar struktur tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sumber : data dinas transmigrasi

Dari keterangan bagan di atas bahwa struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat saling berkaitan dimana seorang Kepala Dinas memiliki jabatan yang paling tertinggi dan terhubung langsung kepada jabatan Fungsional, tata usaha, dan UPTD. Yang dimana seorang kepala Dinas selalu mendapatkan informasi dan perkembangan melalui bagian tersebut.

Sedangkan hubungan Tata usaha berhubungan dengan sub.bagian rencana kerja dan keuangan, sub.bagian umum dan perlengkapan serta sub.bagian kerja dan keuangan. Yang dimana sub.bagian – bagian tersebut memiliki peranan dalam mengelola di berbagai bidang.

- Bidang Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja yang di mana di dalam bidang tersebut Kepala Bidang memiliki bawahan atau seksi – seksi seperti seksi pelatihan dan produktifitas, seksi stadarisasi dan sertifikasi pemagangan serta seksi penyediaan dan penggunaan.
- Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan yang dimana di dalam bidang tersebut Kepala Bidang memiliki bawahan sama seperti bidang – bidang yang lain, bawahan kepala bidang ini juga memiliki seksi – seksi seperti seksi hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan, seksi jaminan sosial dan kesejahteraan, seksi norma kerja keselamatan dan kesehatan kerja.
- Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi yang dimana didalam bidang tersebut juga memiliki kepala bidang yang bertanggung jawab

penuh yang di bantu dengan seksi – seksi seperti seksi penataan potensi kawasan transmigrasi, seksi sarana dan prsarana transmigrasi serta seksi keserasian lingkungan dan legitimasi lahan.

- Bidang Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi sama seperti bidang yang lain memiliki tugas dan tanggung jawab yang di pegang oleh kepala bidang dan di bantu oleh seksi – seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang dalam pekerjaan seksi masing – masing, adapun seksi di bawah bidang ini adalah seksi penempatan transmigrasi dan kerja sama daerah, seksi pembinaan sosial budaya dan seksi pembinaan usaha ekonomi.

Adapun dari keempat bidang tersebut dan dua belas seksi – seksi yang ada memiliki peran dan tanggung jawab yang penuh atas pekerjaan yang telah di berikan oleh kepala Dinas, masing – masing seksi harus memberikan laporan kepada Kepala Bidang masing – masing guna menjelaskan kegiatan selama sebulan penuh, dan menjelaskan secara rinci kegiatan yang di lakukan. Setelah keempat kepala bidang menerima laporan dari masing – masing seksi, tugas kepala bidang adalah memberikan laporan bulanan ataupun tahunan guna menjelaskan kegitan yang di lakukan oleh bidang masing-masing kepada sub-sub bagian yang akan di rapat kan kepada kepala dinas untuk menjelaskan kegiatan tersebut.

Setelah kepala dinas menerima laporan dan penjelasan barulah kepala dinas menyerahkan laporan kepada kepala daerah yang dimana disini Gubernur Kalimantan Barat sebagai Kepala daerah.

1.9 Job description

A. Kepala Dinas

Sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 45 Tahun 2008, bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

1. Penetapan prgram kerja di biodang tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas.
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengkoordinasian dan fasilitas kegiatan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengendalian kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi pada kabupaten / kota.

6. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan program kerja yang di tetapkan.
9. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantu dan tugas lainnya dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh Gubernur.

B. Sekretariat

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, administrasi, kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dilingkungan sekretariat
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur

4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan di bidang keuangan dan aset.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekertariat
6. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan sekertariat
7. Pengelolaan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi dilingkungan Dinas Tenaga kerja transmigrasi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan dinas.
9. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku
    a. Sub bagian rencana kerja , monitoring dan evaluasi
    b. Sub bagian umum dan aparatur
    c. Sub bagian keuangan dan aset

C. Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Fungsi :

1. Penyusunan program rencana kerja di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja
2. Penyusunan rencana kerja dilingkungan sekretariat
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi, sertifikasi akreditasi dan pemagangan tenaga kerja
5. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyediaan dan penggunaan tenaga kerja
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja
7. Pengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fugsi dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja
8. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pembinaan dan pengawasan dibidang pelatihan dan penempatan tengan kerj kepala dinasa pada kabupaten/kota
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok ,dan fungsi dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja

11. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang diserahkan oleh Kepala Dinas
12. Pelaksanaan tugas lain dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja yang diserahkan oleh Kepala Dinas

    Bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja membawahi :

    a. Seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
    b. Seksi standarisasi, sertifikasi, akriditasi, dan pemagangan
    c. Seksi penyediaan dan penggunaan tenaga kerja

D. Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Tugas pokok :

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang syarat kerja dan hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan dan norma kerja serta perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Fungsi :

1. Penyusunan program rencana kerja dibidang pembangunan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang bina syarat kerja dan hubungan industrial.
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang jaminan sosial tenaga kerja pengupahan dan norma kerja.

4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan tenaga kerja keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fugsi dibidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
6. Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
7. Penyelenggaraan kegiatan dibidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pembinaan dan pengawasan dibidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan pada kabupaten/kota.
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
10. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
11. Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan yang diserahkan oleh kepala dinas.

    Bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan membawahi :

    a. Seksi bina syarat kerja dan hubungan industrial

b. Seksi jaminan sosial, tenaga kerja, pengupahan dan norma kerja
c. Seksi perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

E. Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan

Tugas pokok :

Bidang penyiapan dan penempatan treansmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyiapan pemukiman
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan transmigrasi
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi
5. Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi
6. Penyelenggara kegiatan dibidang penyiapan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pembinaan dan pengawasan dibidang penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi pada kabupaten dan kota
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan tugas pokok dan fungsi dibidang penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi
10. Pelaksanaan tugas lain dibidang penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi yang diserahkan oleh kepala dinas.

    Bidang penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi membawahi :

    a. Seksi penyiapan pemukiman
    b. Seksi penempatan transmigrasi

F. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pembinaan sosial budaya dan sumber daya manusia,pembinaan usaha ekonomi dan investasi, serta sarana prasarana dan informasi ketransmigrasian.

Fungsi :

1. Penyusunan program rencana kerja dibidang pembinaan masyarakat dan kawasan transmigarasi

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan sosial budaya dan sumber daya manusia
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha ekonomi dan investasi
4. Penyiapan bahan dan rumusan kebijakan teknis di bidang sarana, parasarana dan informasi ketransmigrasian
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi
6. Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi
7. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Pembinaan dan pengawasan dibidang pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi pada kabupaten/kota.
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi
10. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi

11. Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang diserahkan oleh kepala dinas.

1.10 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diberikan pada saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat adalah berupa :

Tabel 1.1

Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung perkantoran	3	Terdiri atas gedung utama, gedung secretariat transmigrasi dan gedung tenaga kerja
2.	Ruang pimpinan	6	Tempat pimpinan dinas berkerja sehari – hari.
3.	Ruang Karyawan	12	Tempat Karyawan Dinas Transmigrasi bekerja sehari-hari.
4.	Ruangan rapat	4	Digunakan saat rapat dengan para karyawan masing-masing dan para kolega yang hadir.
5.	Ruang Tamu	2	Bersedia di depan masing-masing ruangan kantor untuk menunggu dan

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
			menerima para tamu serta kolega yang datang berkunjung.
6.	musholla	2	Tempat beribadah para karyawan.
7.	Kantin	3	Tempat makan karyawan.
8.	dapur	3	Tempat untuk menyimpan peralatan karyawan.
9.	Lapangan Upacara	1	Lapangan untuk melaksanakan kegiatan keseharian pegawai untuk menghormati bendera dan senam pagi.
10.	Lapangan Parkir	3	Khusus menyimpan kendaraan, motor, dan mobil pegawai serta sepeda.
11.	Lapangan olahraga	1	Yaitu lapangan tenis.

Sumber : data perusahaan Tahun 2011

Table 1.2

Sarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Meja dan kursi kantor	52	Terdiri dari 3 gedung dan digunakan untuk para karyawan dinas transmigrasi
2.	Meja rapat	4	Digunakan sewaktu melakukan rapat baik kepada karyawan kantor maupun dari pihak luar.
3.	Lemari	4	Tempat karyawan menyimpan draft-draft kantor yang penting.
4.	Billing kabinet	4	Tempat para karyawan menyimpan barang-barang kantor.
5.	Telepon	6	Berada dan tersedia di setiap ruangan kantor dinas transmigrasi.
6.	faximile	6	Berada dan tersedia di setiap ruangan kantor dinas transmigrasi.
7.	komputer	10	Computer yang berada di dinas tenaga kerja transmigrasi.
8.	televisi	3	Berada satu buah di setiap ruangan

			kantor.
9.	printer	3	Guna untuk memberikan kemudahan karyawan dalam penyelesaian tugasnya.

Sumber : data perusahaan, 2011

1.11 Lokasi dan waktu PKL

1.11.1 Lokasi tempat melakukan Praktek Kerja Lapangan

Lokasi dilakukannya Praktek Kerja Lapangan bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jl.Achmad Yani No. 6 A Pontianak – Kalimantan Barat.

1.11.2 Waktu Praktek kerja Lapangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dari tanggal 11 july 2011 hingga tanggal 12 Agustus 2011. Dari hari senin-jumat pukul 07.00 sampai dengan selesai.